

SEMINAR NASIONAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (AIPI)
JAKARTA, 12 AGUSTUS 2026

Pemilih sebagai Prinsipal

*Delegasi, Akuntabilitas, dan Pilihan Rasional
dalam Demokrasi Elektoral Indonesia*

Burhanuddin Muhtadi

Professor of political science Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) Jakarta
Executive director of Indikator Politik Indonesia
Visiting senior fellow ISEAS – Yusof Ishak Institute Singapore

Lima Pertanyaan yang Membingkai Presentasi Ini

01

Bagaimana seharusnya relasi pemilih, partai politik, dan pemerintahan dibangun dalam demokrasi presidensial?

02

Sejauh mana pemilih benar-benar berfungsi sebagai prinsipal dalam sistem demokrasi Indonesia?

03

Siapa saja Kelompok Strategik di antara lebih dari 200 juta pemilih Indonesia?

04

Mengapa kesadaran kritis untuk menggunakan hak pilih menjadi sangat penting?

05

Mengapa menuntut program untuk kebaikan bersama lebih penting daripada meminta uang atau sembako?

Teori Delegasi: Pemilih sebagai Prinsipal

Dalam teori demokrasi representatif, hubungan antara warga negara dan pejabat terpilih dipahami sebagai relasi prinsipal–agen. Pemilih (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada wakilnya (agen) dengan ekspektasi bahwa agen bertindak untuk kepentingan prinsipal — dan dapat diberhentikan atau tidak dipilih kembali bila gagal memenuhi ekspektasi itu.

Dua mekanisme membuat delegasi ini bekerja: seleksi (memilih kandidat yang paling mungkin bertindak untuk kepentingan publik) dan akuntabilitas (menghukum atau memberi penghargaan atas kinerja lewat pemilu berikutnya).

DUA MEKANISME KONTROL PRINSIPAL



Seleksi

Memilih kandidat yang berkompeten dan berniat baik sejak awal, berdasarkan rekam jejak dan program — bukan sekadar popularitas.



Akuntabilitas

Mengevaluasi kinerja pejabat terpilih secara berkala, memberi penghargaan lewat pemilihan kembali atau sanksi lewat penggantian.

1. Descriptive representation

- **Brief Description.** The extent to which a representative resembles those being represented.
- **Main Research Question.** Does the representative look like, have common interests with, or share certain experiences with the represented?
- **Implicit Standards for Evaluating Representatives.** Assess the representative by the accuracy of the resemblance between the representative and the represented.

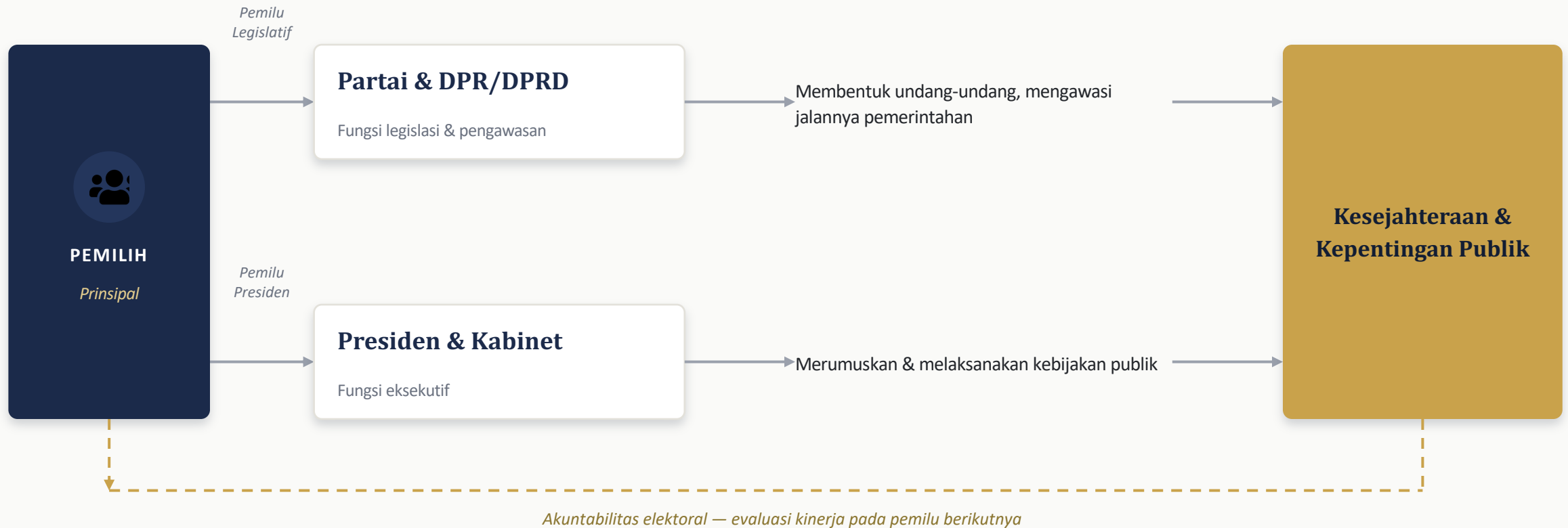
2. Substantive representation

- **Brief Description.** The activity of representatives—that is, the actions taken on behalf of, in the interest of, as an agent of, and as a substitute for the represented. (acting for, ideological similarity)
- **Main Research Question.** Does the representative advance the policy preferences that serve the interests of the represented?
- **Implicit Standards for Evaluating Representatives.** Assess a representative by the extent to which policy outcomes advanced by a representative serve “the best interests” of their constituents.

PERTANYAAN 01

Dua Rantai Delegasi dalam Demokrasi Presidensial

Berbeda dari sistem parlementer yang mengenal satu rantai delegasi (pemilih → parlemen → perdana menteri), demokrasi presidensial membentuk dua rantai yang berjalan paralel — karena presiden dan legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.



Empat Ciri Presidensialisme yang Membentuk Relasi Ini

01

Legitimasi Ganda

Presiden dan DPR sama-sama mengklaim mandat langsung dari rakyat — berpotensi menimbulkan kebuntuan (deadlock) ketika preferensi keduanya berbeda.

02

Pemisahan Kekuasaan Tegas

Checks and balances antar-cabang kekuasaan lebih kuat, namun tanggung jawab kebijakan menjadi kabur — memudahkan saling lempar tanggung jawab (blame-shifting).

03

Masa Jabatan Tetap

Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah jalan hanya karena kehilangan dukungan politik — akuntabilitas efektif hanya tersedia secara periodik lewat pemilu.

04

Personalisasi Politik

Pemilihan presiden secara langsung mendorong partai menjadi kendaraan figur individual, melemahkan pelebagaan platform kebijakan partai jangka panjang.

Prinsipal yang Lemah: Idealisasi vs. Realitas

Secara normatif pemilih adalah prinsipal. Namun di lapangan, sejumlah kondisi struktural membuat kendali itu jauh lebih lemah daripada yang diasumsikan teori.



Asimetri Informasi

Sistem proporsional terbuka menghadirkan begitu banyak kandidat sehingga pemilih sulit memantau rekam jejak dan kinerja setiap wakilnya secara individual.



Klientelisme & Politik Uang

Transaksi jangka pendek (uang, sembako) menggantikan evaluasi programatik jangka panjang, mengaburkan sinyal preferensi kebijakan pemilih.



Personalisasi Partai

Ikatan pemilih lebih kuat pada figur ketimbang platform kebijakan partai, sehingga akuntabilitas partai sebagai institusi menjadi lemah.

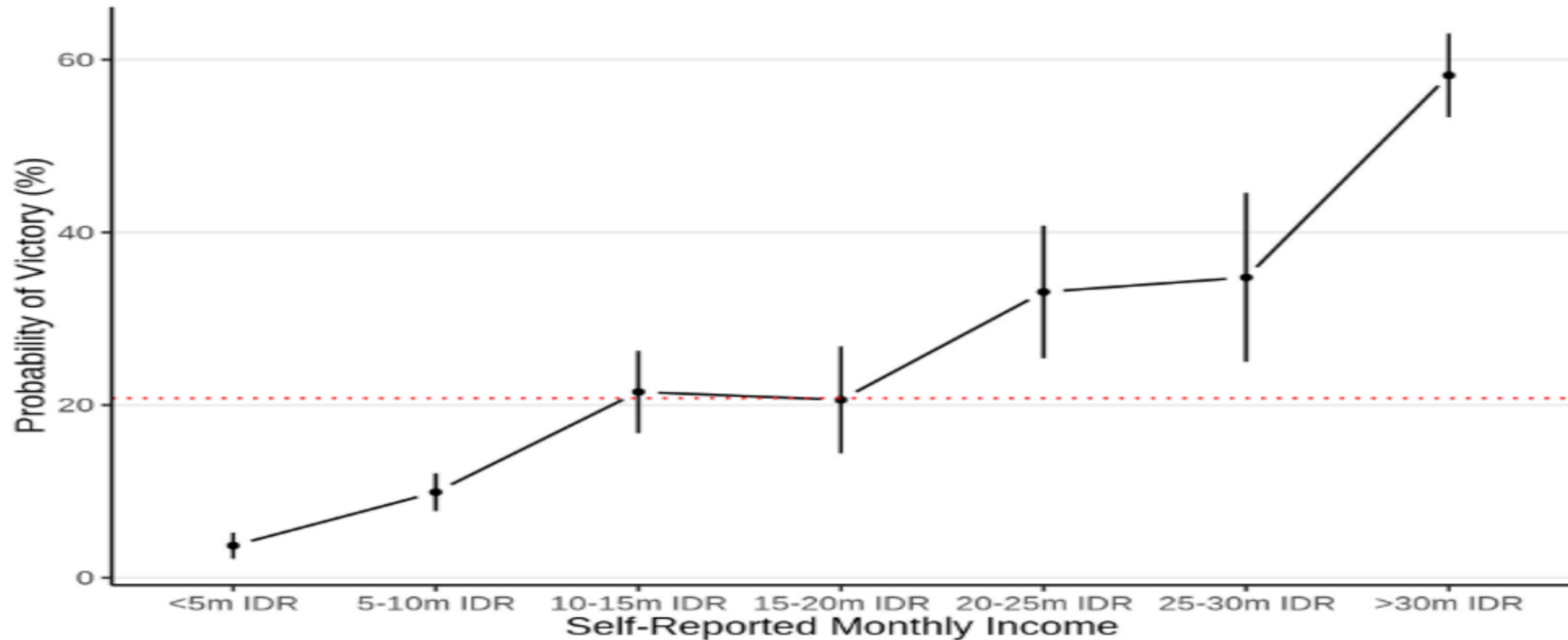


Efikasi Politik Rendah

Banyak pemilih merasa suaranya tak berpengaruh terhadap kebijakan — melemahkan insentif untuk memantau dan menuntut akuntabilitas.

Inequality along class lines in legislatures

Figure 1: relationship b/w candidate income and probability of victory



Source: Kuipers and Warburton 2024

Rising number of **business politicians** joining the political arena

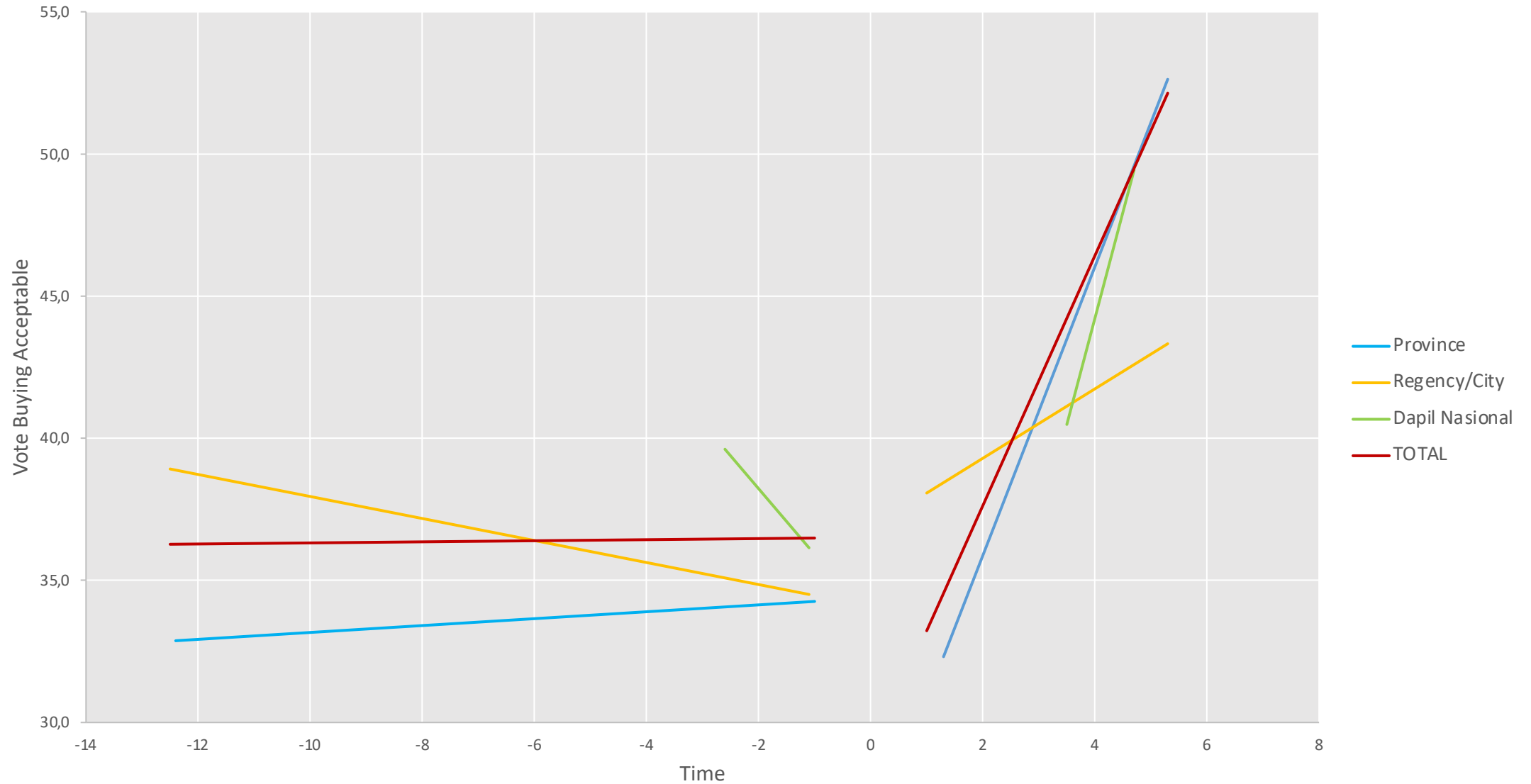
- 48% MPs in 2014-2019
- 55% in 2019-2024
- 61% in 2024-2029

Comparative literature explains why business people have an advantage and are successful in electoral politics.

Resources and networks/expensive campaigns – the strongest evidence.

Gatekeeping by party elites: the strongest evidence.

Trendline Plot of Vote Buying Acceptability: Before April 2019 Vs After April 2019



Source: Muhtadi 2024

Ketika Kendali Prinsipal Melemah

Dalam bahasa teori keagenan, kelemahan ini disebut agency slack; ruang gerak yang dimanfaatkan agen (wakil rakyat) untuk menyimpang dari kepentingan prinsipal (pemilih).

01

Rent-Seeking

Pejabat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, alih-alih kepentingan publik yang lebih luas.

02

Representasi Substantif Rendah

Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan elite atau donor kampanye, bukan preferensi kebijakan mayoritas pemilih.

03

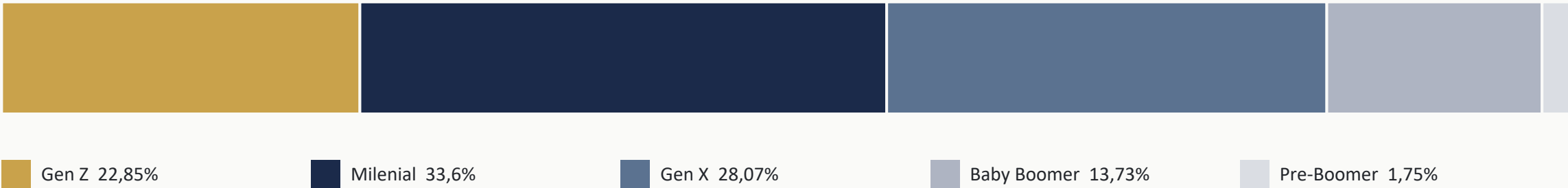
Korupsi Struktural

Lemahnya pengawasan publik memperbesar ruang bagi praktik korupsi yang sulit dideteksi maupun dihukum secara elektoral.

PERTANYAAN 03

Peta Generasi di antara 204,8 Juta Pemilih Tetap

Sebelum berbicara soal ideologi atau afiliasi, lapisan pertama dari “kelompok strategis” adalah komposisi usia — karena di sinilah kekuatan elektoral riil berada.



56,45%

Gen Z + Milenial gabungan
(113,6 juta pemilih)

Untuk pertama kalinya, mayoritas pemilih Indonesia adalah kelompok yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan — kini — konten bergenerasi AI. Ikatan partisan mereka relatif cair, membuat kelompok ini paling persuadable sekaligus paling rentan terpapar disinformasi.

Kelompok Strategik Lain di Luar Faktor Usia



Pemilih Pemula & Swing Voters

Belum memiliki ikatan partisan yang mengakar; preferensi mereka paling mungkin berubah oleh informasi baru, termasuk disinformasi, menjelang hari pemungutan suara.



Pemilih di Daerah 3T

Akses informasi dan pengawasan pemilu yang lebih terbatas membuat kelompok ini rentan dimobilisasi lewat jalur klientelistik ketimbang programatik.



Kelompok Rentan & Minoritas

Penyandang disabilitas, kelompok adat, dan minoritas agama/etnis kerap luput dari perhatian program kandidat meski jumlahnya signifikan secara agregat.



Diaspora & Pemilih Luar Negeri

1,75 juta pemilih di luar negeri kerap terabaikan dalam wacana kampanye domestik, padahal berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Hak Pilih adalah Satu-satunya Instrumen Kontrol Langsung

Di luar musim pemilu, pemilih memiliki sedikit sekali saluran formal untuk memengaruhi pejabat terpilih. Kotak suara adalah momen ketika kontrol prinsipal berada di titik paling kuat — dan paling jarang digunakan secara maksimal.

KETIKA HAK PILIH TIDAK DIGUNAKAN

- Legitimasi hasil pemilu melemah secara proporsional dengan tingkat abstensi
- Suara yang tersisa lebih mudah dimobilisasi lewat jalur klientelistik
- Agenda kebijakan condong ke kelompok yang konsisten memilih, mengabaikan yang tidak

KETIKA HAK PILIH DIGUNAKAN SECARA KRITIS

- ✓ Setiap suara berfungsi sebagai sinyal preferensi kebijakan yang harus direspons
- ✓ Kandidat berkinerja buruk menghadapi risiko elektoral yang nyata
- ✓ Representasi bergerak mendekati kepentingan mayoritas, bukan hanya yang paling vokal

Dari Pemilih Pasif menjadi Pemilih Kritis

Kesadaran kritis bukan sekadar “menggunakan hak pilih,” melainkan menggunakannya dengan basis penalaran yang jelas. Tiga pergeseran berikut menandai transisi itu:

1

Dari Identitas ke Rekam Jejak

Bukan sekadar kesamaan suku, agama, atau kedekatan personal, melainkan menilai kinerja dan konsistensi program kandidat.

2

Dari Emosi ke Evaluasi

Tidak terpengaruh semata oleh citra, jargon, atau sensasi kampanye — termasuk konten yang dimanipulasi secara digital.

3

Dari Pasif ke Menuntut

Tidak menunggu janji ditepati, melainkan secara aktif menagih akuntabilitas sepanjang masa jabatan, bukan hanya saat kampanye.

Program untuk Kebaikan Bersama, atau Uang dan Sembako?

Dua model relasi pemilih–kandidat yang secara fundamental berbeda konsekuensinya bagi kualitas demokrasi:



Politik Klientelistik

Sifat transaksi	Individual, sesaat, terputus setelah suara diberikan
Yang diuntungkan	Penerima langsung dalam jumlah terbatas
Durasi manfaat	Habis dalam hitungan hari
Insentif kandidat	Fokus pada mobilisasi suara, bukan kinerja kebijakan
Dampak jangka panjang	Struktur kesejahteraan tidak berubah



Politik Programatik

Sifat transaksi	Kolektif, mengikat lewat janji kebijakan publik
Yang diuntungkan	Seluruh kelompok sasaran kebijakan, tanpa terkecuali
Durasi manfaat	Berlangsung sepanjang masa berlakunya kebijakan
Insentif kandidat	Terdorong membangun rekam jejak & kredibilitas
Dampak jangka panjang	Berpotensi mengubah struktur kesejahteraan

Mengapa Pilihan Ini Menentukan Kualitas Demokrasi

Ketika pemilih menukar suaranya dengan imbalan sesaat, ia sesungguhnya melepaskan alat tawarnya yang paling berharga — justru pada momen ketika alat itu paling bernilai.

1

Perverse Accountability (Pertanggungjawaban yang Tertukar)

Kandidat yang menang lewat politik uang cenderung bukan yang paling kompeten, melainkan yang paling mampu membiayai mobilisasi, termasuk lewat cara-cara koruptif.

2

Utang yang Harus Dibayar Kembali

Biaya kampanye klientelistik harus “balik modal” selama masa jabatan — mendorong rent-seeking dan korupsi begitu terpilih.

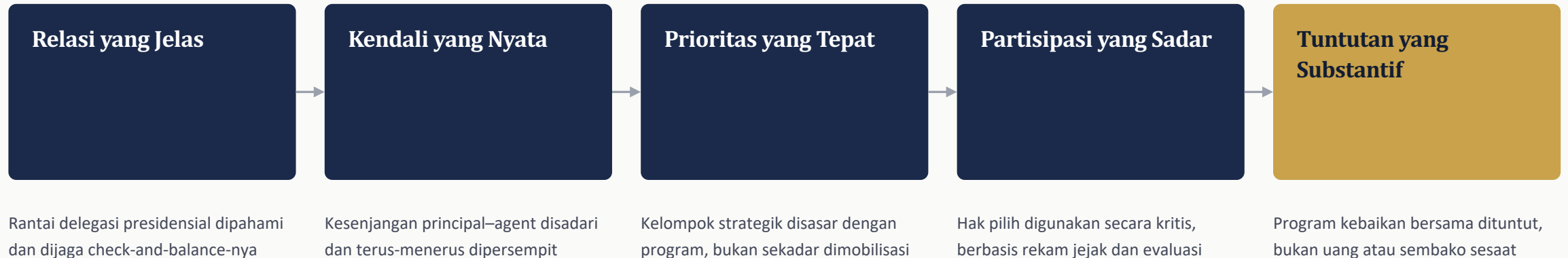
3

Siklus yang Melanggengkan Diri

Ketika politik uang menjadi norma, kandidat berintegritas namun bermodal terbatas tersingkir secara sistematis dari kontestasi.

Merangkai Kembali Lima Jawaban

Kelima pertanyaan ini pada akhirnya menuju satu simpulan yang sama: demokrasi substantif hanya berjalan bila pemilih benar-benar bertindak sebagai prinsipal — bukan sekadar peserta seremonial dalam siklus lima tahunan.



“Pemilih menjadi prinsipal bukan karena diberi, melainkan karena menuntut, mengevaluasi, dan terus mengawasi.”